

FORMAT PENGISIAN LKPJ TA 2022

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Kinerja Program Pembangunan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
T.A 2022

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TAHUN / REALISASI				2022	
			2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI
1	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	69,228	95,716	112,68	108,613	124,425	146,325	150,321
2	Target penerimaan pendapatan daerah (Miliar Rupiah)	510	346,907	379,091	392,54	518,511	428,736	419,395

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Pajak daerah yang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 146,325 Miliar terealisasi sebesar Rp. 150,333 atau sebesar 102,73% dan meningkat sebesar Rp. 25,896 Miliar dari tahun 2021. Sedangkan target penerimaan pendapatan daerah yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 419,395 Miliar atau sebesar 97,82% dari anggaran sebesar Rp. 428,736 Miliar.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi
- Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
1. Penghindaran Kewajiban Pembayaran Pajak,
Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan
 2. Jangkauan pelayanan perbankan yang kurang luas dan keterbatasan waktu pelayanan perbankan di wilayah desa terpencil
 3. Wajib Pajak Kurang Pro Aktif untuk melaporkan ketika ada perubahan data Objek Pajak
Terdapat Objek Pajak yang tidak diketahui Domisili Wajib Pajaknya, tetapi data di SPPT masih menggunakan alamat Wajib Pajak lama (lahan sudah terjual atau berpindahtangan)
 4. Penyampaian SPPT dari Desa/Kelurahan ke Wajib Pajak Seringkali terlambat hingga akhir tahun

5. Perangkat desa yang meninggal atau pensiun tetapi masih menyisakan data tunggakan PBB – P2 yang kemudian digantikan oleh perangkat desa yang baru tetapi belum memahami letak objek pajak dan wajib pajak PBB – P2
6. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal -kanal pembayaran yang ada tanpa perlu menitipkan ke pamong

Untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bapenda menempuh cara sebagai berikut:

1. Membangun Aplikasi Sipentol (Sistem Pendataan Tanah Online) sebagai sarana dalam melaksanakan pemutakhiran dan pembentukan basis data pajak daerah pada kegiatan pendataan PBB P2;
 2. Pemasangan alat Taping Box pada Wajib pajak menghasilkan perekaman transaksi yang sebenarnya, sehingga potensi pajak yang dikenakan dapat sesuai. Hal ini menekan lost potensi pendapatan pajak
 3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal -kanal pembayaran secara langsung;
 4. Memberikan apresiasi kepada pemungut pajak perangkat desa yang tertib administrasi dan lunas tercepat dan bagi wajib pajak yang tertib dan tercepat dalam membayar pajak daerah
 5. Pendataan ulang terkait data-data wajib pajak yang berubah karena faktor jual beli / pindah kepemilikan, perubahan status dari tanah tanpa bangunan menjadi tanah ada bangunan;
- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan
- Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB. Tujuan strategis Bapenda yang telah tertuang pada Renstra 2017-2022 adalah membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut sasaran strategis yang harus dicapai Bapenda adalah target Pendapatan Asli Daerah. Indikator capaian untuk sasaran program pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah
 2. Tercapainya Target penerimaan pendapatan daerah
- Beberapa subkegiatan yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah:
- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - g. Penagihan Pajak Daerah
- d. Anggaran dan realisasi program kegiatan dan sub kegiatan

NO	URUSAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Urusan Keuangan				
	Belanja Operasi	16.571.048.789	16.017.416.867	553.631.922	96,66
	Belanja Modal	2.480.191.340	2.358.288.134	121.903.206	95,08
	JUMLAH	19.051.240.129	18.375.705.001	675.535.128	96,45

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.603.437.469,00	14.144.983.248,00	96,86
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.162.000,00	50.337.450,00	79,70
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.162.000,00	50.337.450,00	79,70
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.027.269.310,00	9.770.875.126,00	97,44
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.027.269.310,00	9.770.875.126,00	97,44
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.800.000,00	41.158.800,00	98,47
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.800.000,00	41.158.800,00	98,47
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	841.017.819,00	815.014.250,00	96,91
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.844.900,00	10.844.900,00	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.285.300,00	37.880.000,00	98,94
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.852.000,00	29.400.500,00	95,30
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.350.000,00	86.812.500,00	91,05
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.415.000,00	43.415.000,00	100,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.270.619,00	606.661.350,00	97,49

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.917.350.340,00	1.797.345.634,00	93,74
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.587.011.090,00	1.482.549.634,00	93,42
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.339.250,00	314.796.000,00	95,29
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.376.000,00	797.263.308,00	96,83
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.340.000,00	13.300.000,00	99,70
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.262.000,00	129.618.388,00	94,43
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.774.000,00	654.344.920,00	97,26
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.462.000,00	872.988.680,00	98,15
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.600.000,00	191.606.880,00	95,52
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.100.000,00	92.070.800,00	95,81
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.762.000,00	589.311.000,00	99,42
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.447.802.660,00	4.230.721.753,00	95,12
2.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.447.802.660,00	4.230.721.753,00	95,12
2.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	523.654.600,00	491.742.200,00	93,91
2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	375.662.800,00	364.690.570,00	97,08
2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	70.768.000,00	53.685.000,00	75,86
2.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	455.298.500,00	432.213.750,00	94,93
2.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.682.816.000,00	1.656.395.000,00	98,43
2.1.6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	108.999.600,00	99.848.000,00	91,60
2.1.7	Penagihan Pajak Daerah	1.230.603.160,00	1.132.147.233,00	92,00
	Jumlah	19.051.240.129,00	18.375.705.001,00	96,45

- e. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak Kegiatan dan subkegiatan meliputi keluaran/ hasil dari pelaksanaan kegiatan

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Keluaran Kegiatan	: Jenis Dokumen (LKjIP, Renja, Evaluasi Renstra, Laporan Keuangan, LPPD, LKPj, RKA, DPA)
	Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan.
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Keluaran Kegiatan	: Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya
	Hasil Kegiatan	: Terbayarnya semua kewajiban terhadap pegawai.
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	
	Sub Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Keluaran Kegiatan	: Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Hasil Kegiatan	: Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor e.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Keluaran Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	Hasil Kegiatan	: Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor.
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan	: a.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

			b.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	:	Jenis Peralatan Kantor yang Baru
	Hasil Kegiatan	:	Persentase Aset dalam Kondisi Baik
	f. Kegiatan Penyediaan Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Keluaran Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Hasil Kegiatan	:	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor.
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Keluaran Kegiatan	:	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
	Hasil Kegiatan	:	Persentase Aset dalam kondisi baik
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah d. Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah g. Penagihan Pajak Daerah
	Keluaran Kegiatan	:	Angka Ketetapan Pajak Daerah
	Hasil Kegiatan	:	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan Program	:	Pencapaian target pendapatan pajak daerah
Dampak Program	:	Peningkatan pendapatan asli daerah
Manfaat Program	:	Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD meningkat

- f. Penghargaan yang didapat di tahun 2022 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)
1. Penghargaan TP2DD Teraktif Se-Eks Karesidenan Pekalongan (Sampan Digifest 2022)



2. Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif Peringkat 1 Tahun 2022



3. TOP 10 Kategori Kurang dari 2 (dua) Tahun Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Inovasi Sistem Pendataan Tanah Online (Sipentol)



B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Badan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%		
1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (lkjip, lkpi, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja, laporan bulanan	6 Dokumen	10 Dokumen (RKA, DPA, Renstra, Renja, Evaluasi Renja, Laporan Bulanan, LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan)		
1.1				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lkjip, lkpi, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja, laporan bulanan Laporan Keuangan)	6 Dokumen	10 Dokumen (RKA, DPA, Renstra, Renja, Evaluasi Renja, Laporan Bulanan, LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan)		
2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	44 Orang	44 Orang		
2.1				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	44 Orang	44 Orang		
3				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 stel	50 stel		
3.1				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	50 stel	50 stel		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Atribut Kelengkapannya					
4				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan		
4.1				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/Penerangan	14 jenis	14 jenis		
4.2				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	24 jenis	24 jenis		
4.3				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	26 jenis		
4.4				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	5 jenis	5 jenis		
4.5				Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	8 jenis	8 jenis		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Cetakan dan Penggandaan					
4.6				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	710 Laporan	710 Laporan		
5				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%		
5.1				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru	96 Unit	96 Unit		
5.2				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru	75 Unit	75 Unit		
6				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan		
6.1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar Terdistribusi	3000 buah	3000 buah		
6.2				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 bulan	5 jenis	5 jenis		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
6.3				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	27 Orang	27 Orang		
7				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun		
7.1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	10 unit	10 unit		
7.2				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi Baik	60 unit	60 unit		
7.3				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	2 unit	2 unit		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kantor dan Bangunan Lainnya					
II	Badan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Kewangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah	146,325 M	150,33 M		
1				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah	146,325 M	150,33 M		
1.1				Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; penganggaran target pajak daerah); penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa(dokumen)	38000 lembar	38000 lembar		
					Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang terhutang) (Dokumen)	22 Dokumen	22 Dokumen		
					Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi; (Obyek Pajak)	95 Dokumen	95 Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.2				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK)	3 SK	3 SK		
					Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)	36 lembar surat	36 lembar surat		
1.3				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Perda tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah (Perda)	2 Perda	2 Perda		
1.4				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan (lembar)	3000 lembar	3000 lembar		
1.5				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jenis Dokumen Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (buku)	315 buku	315 buku		
					Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;	21400 Laporan	21400 Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (Laporan)				
					Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaanyang diterbitkan (lembar)	1050000 lembar	1050000 lembar		
					Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar)	923 lembar	923 lembar		
					Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak yang dinilai ulang (OP)	48000 OP	48000 OP		
					Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK)	100 SK	100 SK		
					Jumlah SK tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)	150 SK	150 SK		
					Perubahan Peta Objek Pajak (bidang)	60000 bidang	60000 bidang		
1.6				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak	15000 berkas	15000 berkas		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					daerah yang diteliti) (berkas)				
1.7				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo (Rp)	Rp. 90 M	Rp. 90 M		

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19690741 199103 1 010